



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
SUB UNIT KERJA : BIDANG KEPEMUDAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULISTYO YULI UTOMO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **210571**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 126 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 71 m2 di KOTA SEMARANG , LAINNYA Rp. 130.000.000
4. Tanah Seluas 84 m2 di KOTA SEMARANG , LAINNYA Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/70 m2 di KOTA SEMARANG , LAINNYA Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY GD 8 1.5 I-DSI MT (S) Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 11.786.818**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 1.341.786.818

III. HUTANG Rp. 650.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 691.786.818

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.